

## **PRAGMATIK KOGNITIF: PRINSIP KERJA SAMA DAN KESOPANAN BERBAHASA DI MAYANTARA**

**Nengah Arnawa**

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Email: [nengah.arnawa65@gmail.com](mailto:nengah.arnawa65@gmail.com)

### **Abstrak**

Makalah ini ditulis untuk membangun kesadaran penutur agar senantiasa melibatkan kognitif sebelum, saat, dan sesudah bertindak ujar. Untuk kepentingan analisis, data dikumpulkan dari pemberitaan tentang pidana tindak bahasa yang dinilai merupakan pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan. Pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan merupakan pengingkaran hakikat tindak ujar yang merupakan pokok kajian pragmatik. Pragmatik didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Apapun sudut pandangnya, pragmatik selalu berkaitan dengan studi tindak ujar (*speech acts*) yang terikat konteks. Keserampangan bertindak ujar, khususnya di ruang mayantara, telah banyak menyeret penuturnya ke ranah hukum; ada yang diselesaikan secara *restorative justice*, namun tidak sedikit yang berujung pada sanksi pidana. Sesungguhnya, penutur dapat menghindari ancaman pidana defamasi tersebut jika sebelumnya mengaplikasikan pragmatik kognitif. Pragmatik kognitif memiliki peran urgen sebelum seseorang mengatakan sesuatu. Pragmatik kognitif menekankan pentingnya pemenuhan kondisi persiapan sebelum melakukan tindak ujar. Pada kondisi persiapan ini, penutur dapat mengevaluasi dan mengonsiderasi pilihan diksi serta modus ujaran yang akan digunakan untuk mewujudkan tindak ujarinya. Pada fase ini, kognisi penutur berfungsi menyeleksi diksi dan modus ujaran. Proses seleksi diksi dan modus ujaran merupakan fungsi kognitif untuk berpikir. Berpikir pada hakikatnya merupakan tindak bahasa internal.

**Kata Kunci:** *Pragmatik Kognitif, Tindak Ujar, Prinsip Kerja Sama, Prinsip Kesopanan*

### **PENDAHULUAN**

Sejak lama, relasi bahasa dengan kognisi telah menjadi objek kajian para linguist dan psikolog. Para linguist memanfaatkan kognisi untuk menjelaskan tiga hal, yaitu: pemerolehan, pemahaman, dan pemroduksian bahasa (Dardjwidjojo, 2003). Para linguist menyakini bahwa kognisi sangat berperan pada ketiga proses kebahasaan tersebut. Pemerolehan, pemahaman, dan pemroduksian bahasa berlangsung dan bersesuaian dengan perkembangan kognitif. Secara lebih spesifik, pengembang teori linguistik transformasi generatif berpandangan bahwa kognitif sangat berperan pada proses *trasformation roles* ‘pembentukan kaidah transformasi’. Sebaliknya, para psikolog memanfaatkan kajian linguistik untuk menjelaskan perilaku berbahasa dan proses berpikir; keduanya merupakan aktivitas kognitif, yang oleh psikolog, dipandang sebagai *the nature of human* ‘hakikat manusia’. Para psikolog berpandangan bahwa perilaku berbahasa merupakan *concept formation* ‘pembentukan konsep’ melalui tiga tahap, yaitu; *semanticity* ‘kebermaknaan’, *generativity* ‘kreativitas’, dan *displacement* ‘pemindahan’. Ketiga hal itu berlangsung simultan dalam komunikasi (Crider, dkk.,

1983). Setakat dengan itu, relasi perkembangan kognitif dengan linguistik dipaparkan oleh Piaget. Psikolog ini menjelaskan bahwa ada 4 periode perkembangan kognitif yang berimplikasi pada perkembangan bahasa, yaitu: periode sensorimotorik ( $\leq 2$  tahun), yang ditandai dengan kemampuan peniruan bunyi dan pemahaman kata-kata sederhana; periode praoperasional (2 – 7 tahun), pemerolehan bahasa yang semakin berkembang, namun masih bersifat egosentrik; periode operasional konkret (7 – 11 tahun), kognisi anak berkembang ke arah orang dewasa sehingga dapat menggunakan bahasa untuk bernalar dan melakukan deskripsi kualitatif; periode operasional formal ( $\geq 11$  tahun), kognisi berkembang pesat yang ditandai dengan kemampuan menggunakan bahasa untuk berpikir abstrak (Sund, 1976; Miller, 1993; Arnawa, 2005).

Aktivitas berbahasa dan berpikir keduanya melibatkan kognisi yang saling mempengaruhi. Berbahasa merupakan aktivitas penyampaian pikiran kepada orang lain; sedangkan berpikir, berefleksi, dan bersadar diri dipandang sebagai aktivitas berbahasa ke dalam diri (Chauchard, 1983). Jadi, berbahasa dan berpikir merupakan aktivitas kognisi yang dapat ditelaah dari berbagai aspek. Secara linguistik, aktivitas berbahasa eksternal dipadankan dengan komunikasi; yang dalam realitasnya dipengaruhi oleh konteks. Keanekaragaman konteks akan menentukan pilihan-pilihan konstruksi linguistik yang digunakan dalam komunikasi. Dengan alasan konteks itulah, seseorang sering mengucapkan suatu kalimat yang berbeda dengan apa yang dimaksudkannya. Cabang linguistik yang berfokus pada objek penggunaan bahasa terikat konteks itu disebut pragmatik.

Dalam berbagai literatur, para pakar mendefinisikan pragmatik secara berbeda-beda. Akan tetapi apapun definisi yang dikemukakan, para pakar tetap bertumpu pada konsep yang sama, yakni kajian makna konteks yang disampaikan penutur dan diinterpretasi petutur (Yule, 1996). Merujuk batasan tersebut, pragmatik menelaah maksud-maksud penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi. Interpretasi maksud ujaran melibatkan proses kognitif untuk dapat menafsirkan perbedaan representasi semantik dengan interpretasi pragmatiknya. Interpretasi pragmatik ujaran tidak semata-mata bertumpu pada aspek gramatikal tetapi melibatkan faktor-faktor retorik fungsional (Leech, 1993). Dengan demikian, interpretasi pragmatik selalu melibatkan proses kognitif.

Proses kognitif berkaitan dengan aktivitas mental yang memungkinkan seseorang berpikir sehingga dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, atau memberi penilaian (evaluasi) dan pertimbangan (kosiderasi) terhadap sesuatu dan/atau tindakan; tidak terkecuali dalam bertindak bahasa, baik aktif-reseptif maupun aktif-produktif. Merujuk konsep ini, pragmatik kognitif merupakan pendekatan analisis atas fakta penggunaan bahasa dengan melibatkan variabel psikologis yang melatarbelakanginya. Pragmatik kognitif berupaya mengeksplansi aktivitas pikir yang melatarbelakangi seseorang ketika memproduksi dan/atau menginfersi ujaran. Relasi bahasa dengan aspek pikir ini pun banyak dibahas dalam filsafat bahasa; studi yang berfokus pada pengungkapan kebenaran dengan bahasa yang layak dan memadai.

Dalam konteks inilah urgensi pragmatik kognitif sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kebiasaan berbahasa di ruang mayantara (*cyber*).

Perkembangan teknologi informasi secara faktual telah memfasilitasi kemudahan membangun relasi sosial dan kultural yang menembus batas-batas geografis. Dengan teknologi informasi, seseorang bisa berkomunikasi secara *real-time* dengan pihak lain dari belahan dunia yang tidak terbatas. Akan tetapi, di balik kemudahan itu ada ‘ancaman’ pidana defamasi yang juga bisa terjadi secara lintas batas geografis. Untuk menghindari ancaman defmasi di dunia mayantara tersebut, konsep pragmatik kognitif dapat diplikasikan sebagai panduan penerapan prinsip kerja sama dan kesopanan berbahasa. Itulah urgensi pragmatik kognitif pada era kesejagatan (global).

## **METODE**

Makalah ini ditulis dengan berpijak pada prinsip penelitian kualitatif, khususnya model interaksionisme simbolik; studi yang ditekankan pada perilaku manusia dalam hubungan interpersonalnya. Proposisi yang mendasari model penelitian interaksionisme simbolik, bahwa perilaku dan interaksi manusia dapat dibedakan (dianalisis) melalui simbol yang ditampilkan dan maknanya. Analisis data dalam interaksionisme simbolik didasarkan pada asumsi: simbol dan interaksi itu menyatu; simbol dan makna tidak terlepas dari sikap pribadi; simbol berkaitan dengan jati diri, lingkungan dan hubungan sosial; penggunaan simbol dan maknanya terikat pada situasi tertentu; kajian diarahkan untuk merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya, serta dapat mengungkapkan makna di balik interaksi (Muhadjir, 1998). Dalam konteks kajian ini, simbol itu berupa pilihan tutur (lokusi) yang digunakan penutur; sedangkan makna adalah maksud ilokusinya. Jadi, data kajian ini berupa konstruksi ujaran dalam suatu peristiwa tutur (*speech event*) dan interpretasi maksud atas tuturan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan/atau ditampilkan secara intuitif oleh penutur asli. Data yang terkumpul dianalisis dengan bertumpu pada prinsip fenomenologi empirik-logik.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Prinsip Kerja sama dan Kesopanan di Ruang Mayantara**

Beberapa tahun terakhir, pemberitaan nasional sering dihebohkan oleh penggunaan bahasa Indonesia secara serampangan di media sosial. Salah satu di antaranya adalah unggahan Bima Yudho Saputra pada akun Tiktoknya. Sesungguhnya, niatnya baik; yakni mengeritik Provinsi Lampung yang tidak maju-maju. Sayangnya, niat baik itu diungkapkan dengan melanggar prinsip kerja sama dan kesopanan. Ia mengatakan ‘Lampung sebagai provinsi *dajjal*’ (CNN, 19-4-2023). Sebelumnya, penyebutan sebagai provinsi *dajjal* pun sempat ditujukan kepada Provinsi Sumatra Barat oleh Muhammad Riza Chalid. Akibatnya, Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), yang diwakili oleh ketua umumnya, Muhammad Rafik, menyomasinya (tempo.co., 6 -12-2015).

Kedua kasus tindak berbahasa itu berumber dari penggunaan kata *dajjal* (Arab ‘menutupi sesuatu, pembohong’). Dalam KBBI edisi ketiga (2001:231), tampaknya

kata *dajjal* telah diadopsi sehingga dieja menjadi dajal. Secara semantik leksikal, dajal merupakan kata berpolisemi, dengan 2 arti: (1) setan (berupa raksasa) yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat; (2) orang yang berkelakuan buruk: penipu, pembohong. Merujuk 2 makna leksikal kata dajal seperti yang tertera dalam KBBI, tampaknya makna yang relevan dirujuk pada kedua kasus tindak berbahasa tersebut adalah makna ke-2. Akan tetapi dilihat dari struktur semantiknya, makna ke-2 tersebut berfitur [+insan] dan [-baik]. Dengan demikian, dalam struktur sintaksisnya, kata dajal membutuhkan argumen yang juga berfitur [+orang]. Oleh karena itu, secara linguistik, kalimat ‘Lampung provinsi dajal’ dan kalimat ‘Sumatra Barat adalah provinsi dajal’ sesungguhnya tidak memenuhi kriteria gramatikal. Lalu, mengapa heboh?

Linguistik struktural yang bertumpu pada aspek gramatikal sering kali gagal menjelaskan penggunaan bahasa secara sosial; yang sesungguhnya bahasa itu merupakan fakta sosial. Bahwa benar, nama suatu provinsi tergolong nomina dengan fitur semantik [-insan] sehingga tidak dapat dipasangkan dengan verba yang berfitur [+insan]. Akan tetapi secara pragmatik, ujaran ‘Lampung provinsi dajal’ dimaksudkan untuk mengertitik provinsi itu yang tidak maju-maju. Jika analisisnya tetap bertumpu pada aspek gramatikal, maka nomina Lampung tidak bisa menerima kritik karena bukan manusia [-insan]. Jadi, penjelasannya harus digeser ke pragmatik.

Pragmatik merupakan studi penggunaan bahasa; yang berorientasi pada penjelasan maksud dari suatu ujaran. Analisis pragmatik tidak hanya bertumpu pada aspek gramatikal tetapi melibatkan aspek psiko-sosial. Pragmatik berpandangan tidak ada (korpus) ujaran yang terbebas dari konteks. Dalam studi pragmatik, setiap ujaran adalah teks yang terikat pada konteks. Bertumpu pada konsep pragmatik tersebut, maka nomina dajal pada ujaran ‘Lampung provinsi dajal’ tidaklah ditujukan pada Provinsi Lampung sebagai nomina [-insan]. Tampaknya, ujaran ‘Lampung provinsi dajal’ dikonstruksi menggunakan majas sinekdoke totem pro parte, yakni penyebutan suatu totalitas untuk menyatakan sebagian. Dalam konteks ujaran tersebut, referen Provinsi Lampung bukanlah daerah geografis dalam batas-batas administratif tertentu; juga bukan seluruh masyarakat Lampung; tetapi lebih ditujukan kepada kepala daerah dan/atau pemimpin daerah lainnya yang menentukan kebijakan pembangunan di provinsi itu. Dengan analisis pragmatis seperti itu, maka ada pihak yang merasa terusik keyamanannya sehingga digulirkan menjadi kasus hukum.

Kasus pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan pun pernah dilakukan oleh Sarumpaet; yang telah divonis bersalah menyebarkan berita bohong dengan pidana 2 tahun penjara (bbc.com., 11-7-2019). Kasus ini bermula dari unggahan pada akun *facebook*-nya bahwa dirinya dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Akibat dari unggahan berita bohong itu, Sarumpaet diminta keluar dari TKN Prabowo - Sandianga Uno. Kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan pun pernah dilakukan oleh Jerinx dengan unggahan ‘IDI kacung WHO’; akibatnya ia divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah (detiknews, 8-6-2021).

Keempat kasus tersebut cukup mewakili kasus-kasus pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan lain yang sering terjadi di ruang mayantara (*cyber*). Persoalannya bukan pada pengekangan hak akan kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-

undang, tetapi lebih pada 2 hal: pertama, pilihan konstruksi linguistik yang digunakan untuk mewujudkan lokusi tindak ujar yang dilakukan; kedua, isi ujaran yang tidak bersesuaian dengan fakta dan/atau tidak didukung bukti yang cukup. Untuk menghindari perulangan kasus sejenis, diperlukan pemahaman prinsip kerja sama dan kesopanan dalam bertindak ujar.

Dalam pragmatik, studi tentang penggunaan bahasa, ditegaskan bahwa ketika seseorang mengatakan sesuatu sesungguhnya ia melakukan sesuatu. Dalam studi pragmatik ini disebut tindak ujar (*speech acts*) (Levinson, 1989). Oleh karena berujar identik dengan bertindak maka tindak ujar pun dapat menjadi objek hukum. Agar terhindar dari jeratan hukum, pengaplikasian prinsip kerja sama (*cooperative principles*) dan prinsip kesopanan (*politeness principles*) dapat dijadikan rujukan saat bertindak ujar. Dalam studi pragmatik, Grace (dalam Bach & Harnis, 1979) merumuskan 4 maksim kerja sama, yakni: maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kuantitas mengatur agar setiap orang memberikan informasi secukupnya. Maksim ini terdiri dari 2 sub-aturan: (a) Buat ujaran Anda seinformatif yang diperlukan! (b) Jangan buat ujaran Anda lebih informatif dari yang diperlukan! Maksim kualitas mengatur agar setiap orang wajib mengatakan hal yang sebenarnya. Maksim ini terdiri dari 2 sub-aturan: (a) Jangan katakan apa yang Anda anggap salah! (b) Jangan katakan sesuatu yang tidak didukung bukti cukup. Maksim relevansi mewajibkan agar setiap orang mengatakan sesuatu yang sesuai dengan topik. Maksim cara mengatur agar setiap orang berbicara jelas. Maksim ini terdiri dari 4 sub-aturan: (a) Hindari ketidakjelasan/kekaburan ungkapan! (b) Hindari kedwimaknaan! (c) Katakan secara singkat! (d) Katakan secara teratur.

Pada kasus pertama dan kedua yang dipicu penggunaan kata dajal, penutur wajib menunjukkan bukti kebohongan pejabat yang dituduh; jika penutur tidak menyertakan bukti yang memadai maka tindak ujar tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran maksim kualitas. Selain itu, ujaran 'Lampung provinsi dajal' pun melanggar maksim kuantitas karena penutur menyebut keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Artinya, pernyataan 'Lampung provinsi dajal' merujuk semua pejabat di Lampung; padahal yang ia maksud hanyalah pejabat tertentu.

Pada kasus unggahan berita bohong oleh Sarumpaet, prinsip kerja sama yang dilanggarnya adalah maksim kualitas. Penutur sesungguhnya tahu apa yang diunggah itu tidak benar. Penutur sadar bahwa ia tidak punya bukti yang cukup untuk mendukung unggahannya. Selanjutnya, pada kasus unggahan 'IDI kacung WHO', ada 3 maksim yang dilanggar. Pertama, maksim kualitas; yakni penutur tidak bisa membuktikan bahwa IDI sebagai kacung WHO. Kedua, pelanggaran terhadap maksim relevansi; yakni yang diunggah penutur tidak relevan dengan situasi saat pandemi. Ketiga, maksim cara; yakni tidak jelas maksud penggunaan kata kacung pada unggahan tersebut.

Selain pelanggaran terhadap prinsip kerja sama, keempat defamasi tersebut terindikasi melanggar prinsip kesopanan (*politeness principles*). Prinsip kesopanan terdiri dari 6 maksim, yaitu: maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), maksim penerimaan (*approbation maxim*), maksim kemurahan (*generosity maxim*), Maksim kerendahan

hati (*modesty maxim*), maksim kecocokan (*agreement maxim*), dan maksim kesimpatian (*sympathy maxim*). Pada kasus penggunaan kata dajal prinsip kesopanan yang dilanggar adalah maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, dan maksim kerendahan hati. Penutur punya hak mengeritik pihak lain, tetapi kritik harus disampaikan dengan tuturan impositif dan tidak melanggar kehormatan pihak lain. Jika dianalisis dengan pendekatan komponensial, maka kata dajal ‘pembongong’ berfitur [+insan], [- baik]; yang artinya, dalam struktur semantiknya kata dajal untuk menyatakan orang yang berkarakter tidak baik (buruk). Penggunaan diksi dajal yang direferenkan kepada pengambil kebijakan di daerah dinilai tidak bersesuaian dengan maksim kebijaksanaan, kemurahan, dan kerendahan hati.

Pada kasus berita bohong Sarumpaet, prinsip kesopanan yang dilanggar adalah maksim kebijaksanaan karena penutur memperbesar keuntungan pada diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Kasus berita bohong ini bertentangan dengan konsep paradoks pragmatik. Selanjutnya pada kasus IDI kacung WHO prinsip kesopanan yang dilanggar adalah maksim kesimpatian. Data menunjukkan ada sebanyak 751 dokter meninggal pada saat pandemi Covid-19 (kompas.com, 14-3-2022). Angka itu cukup besar, sehingga dengan mengatakan ‘IDI kacung WHO’ menunjukkan ketidaksimpatian penutur.

### **Pragmatik Kognitif: Landasan Penanggulangan Pelanggaran Prinsip Kerja sama dan Kesopanan di Ruang Mayantara**

Kognitif bersangkut paut dengan potensi pikir manusia. Kognitif merupakan potensi mental untuk memahami sesuatu. Kognitif merupakan proses berpikir untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan sesuatu peristiwa (Sujiono, dkk.,2006). Apapun aktivitas kognitif akan berelasi dengan penggunaan bahasa karena berpikir identik dengan berbahasa. Jika seseorang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sesungguhnya ia berbahasa secara eksternal; dan yang dikomunikasikan adalah gagasan/ide yang merupakan hasil berpikirnya. Sebaliknya, jika seseorang sedang berpikir pun sesungguhnya ia sedang berbahasa secara internal (Chauchard, 1983). Jadi, baik berbahasa secara eksternal maupun internal selalu melibatkan aktivitas berpikir. Keterlibatan bahasa dalam fungsi-fungsi kognitif melahirkan konsep logika dalam bahasa. Logika merupakan kaidah berpikir (Sumarsono, 2004); sedangkan berpikir adalah berbahasa secara internal. Dengan demikian, ada relasi kuat antara tindak berbahasa (*speech acts*) dengan berlogika. *Speech acts* merupakan kajian pragmatik; sedangkan berlogika bagian dari aktivitas kognitif.

Pragmatik kognitif merupakan telaah aktivitas berpikir pada saat seseorang berbahasa. Pragmatik kognitif berpandangan bahwa berbahasa merupakan tindakan yang melibatkan psiko-fisik. Ujaran yang meluncur dari alat ucap penutur diidentifikasi sebagai aktivitas fisik. Teks yang tergores dari tangan penulis pun merupakan aktivitas fisik. Namun, sebelum alat ucap seseorang meluncurkan ujaran; sebelum tangan penulis menggoreskan teks, selalu didahului oleh proses mental-psikologis. Sebaliknya, untuk memahami maksud ujaran atau teks pun melibatkan aktivitas psiko-fisik. Penerimaan rangsang auditori pada saat mendengar ujaran dan/atau penerimaan

rangsang visual saat membaca teks pun melibatkan proses mental-pisikologis untuk menginferensi isi/maksud. Jadi, baik saat berbahasa secara aktif-produktif maupun aktif-reseptif tetap melibatkan aktivitas psiko-fisik. Pelibatan aktivitas psiko-fisik dalam setiap tindak bahasa menguatkan pentingnya peran pragmatik kognitif.

Pragmatik didefinisikan sebagai studi tindak berbahasa. Tindak berbahasa dibedakan menjadi 2, yaitu memproduksi (*production*) dan memahami (*comprehension*) ujaran. Bagi penutur (pn), pragmatik kognitif berperan untuk menilai, mempertimbangkan pilihan diksi dan sintaksis yang digunakan untuk menyampaikan gagasan agar daya pragmatiknya (*pragmatic force*) efektif. Sebaliknya, bagi petutur (pt), pragmatik kognitif berperan menginferensi maksud ujaran yang terikat konteks (Kecskes, 1999; Mazzone, 2022). Merujuk konsep ini, pragmatik kognitif memiliki peran signifikan pada kondisi persiapan dan pemenuhan perlokusi (Nababan, 1987).

Kondisi persiapan merupakan aktivitas kognitif untuk menilai dan mempertimbangkan pilihan diksi dan modus ujaran yang akan digunakan. Pada fase inilah, penutur (pn) dapat mempertimbangkan apakah pilihan diksi dan modus ujarannya bersesuaian dengan prinsip kerja sama (*cooperative principles*) dan/atau kesopanan (*politeness principles*). Pada fase ini pula penutur dapat mempertimbangkan daya pragmatik (*pragmatic force*) yang ingin disasar. Penutur dapat mengonversi pikirannya menjadi ujaran unik dengan mempertimbangkan prinsip kerja sama dan kesopanan. Penutur dapat mengoptimalkan potensi linguistiknya untuk mengonversi pikirannya menjadi ujaran. Penutur dapat memanfaatkan berbagai gaya bahasa dan metafora yang tersedia. Penutur, misalnya, dapat menggunakan satire, ironi, dan metafora untuk menyelimuti gagasannya sehingga tidak melanggar prinsip kerja sama dan kesantunan. Sebaliknya, petutur dapat memanfaatkan seluruh pengetahuan praaggapannya untuk menginferensi maksud pertuturan. Pedeknya, pragmatik kognitif berperan signifikan dalam mempersiapkan dan memahami tindak ujar.

## **PENUTUP**

Pada bahasa Indonesia, ada satu metafora yang terkenal, yakni lidah lebih tajam daripada pedang. Metafora ini sesungguhnya mengingatkan kita agar selalu berhati-hati saat berujar. Kehati-hatian saat berujar dapat dilakukan dengan menerapkan pragmatik kognitif sebelum mengatakan sesuatu. Pragmatik kognitif menegaskan pentingnya evaluasi dan konsiderasi sebelum mengatakan sesuatu. Jika proses-proses kognitif dilakukan sebelum proses pragmatik niscaya pelanggaran prinsip kerja sama dan kesopanan dapat dihindari.

## **REFERENSI**

- Arnawa, N. (2005). Bahasa Bali Usia Anak-Anak. Disertasi Universitas Udayana Denpasar. Tidak diterbitkan.
- bbc.com. (11/7/2019). Ratna Sarumpaet divonis dua tahun pidana penjara, terbukti bersalah berbohong dan bikin onar. Diakses tanggal 10/10/2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48946433>

- Bach, K., and Harnish, R.M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. New York: The MIT Press.
- Chauchard, P. (1983). *Bahasa dan Pikiran*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Cnnindonesia.com. (19/4/2023). Umur Pendek Kasus Tiktoker Bima Sindir Lampung Provinsi Dajjal. Diakses tanggal 10/10/2024 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418154603-12-939399/umur-pendek-kasus-tiktoker-bima-sindir-lampung-provinsi-dajjal>.
- Crieder, A.B; Goethals, G.R; Kavanaugh, R.D; dan Solomon, P.R. (2003). *Psychology*. London: Scott, Foresman and Company.
- Dardjwidjojo, S. (2003). *Psikolinguistik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Detiknews.com. (8/6/2021). Jejak Kasus Jerinx 'IDI Kacung WHO' Hingga Bebas. Diakses tanggal 10/10/2024 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608085701-12-651556/jejak-kasus-jerinx-idi-kacung-who-hingga-bebas>.
- Keckes, I. (2000). A cognitive-pragmatic: approach to situation-bound utterances. *Journal of Pragmatics*, Vo. 32, 605 – 625. <https://www.albany.edu/faculty/ikeckes/files/A%20cognitive-pragmatic%20approach%20to%20SBUs.pdf>
- kompas.com. (14/3/2022). 751 Dokter Meninggal Dunia Sejak Awal Pandemi Covid-19 hingga 13 Maret 2022. Diakses tanggal 10/10/2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/21195961/751-dokter-meninggal-dunia-sejak-awal-pandemi-covid-19-hingga-13-maret-2022>.
- Leech, G. (1993). *The Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group Limited.
- Levinson, S. (1989). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mazzone, M. (2022). Cognitive Pragmatics. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/publication/339106746\\_Cognitive\\_pragmatics](https://www.researchgate.net/publication/339106746_Cognitive_pragmatics)
- Miller, P.H. (1993). *Theories of Developmental Psychology*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Muhadjir, H.N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nababan, P.W.J. (1987). *Ilmu Pragmatik dan Penerapannya*. Jakarta: Depdikbud.
- Sujiono, Y.N., dkk. (2006). *Metode Pengembangan Kognitif*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sumarsono. (2004) *Filsafat Bahasa*. Jakarta: Grasindo.
- Sund, R.B. (1976). *Piaget for Educators*. Ohio: Charles E. Mirrill Publishing Company.
- tempo.co. (6/12/2015). Sebut Sumatera Barat Provinsi Dajjal, Masyarakat Minang Somasi Riza Chalid. Diakses tanggal 10/10/2024 dari <https://nasional.tempo.co/read/725387/sebut-sumatera-barat-provinsi-dajjal-masyarakat-minang-somasi-riza-chalid>
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. New York: Oxford University Press.

